



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 1500420;
FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-67/PK/PK.4/2020 23 Oktober 2020
Sifat : Segera
Lampiran : Empat Berkas
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD Sesuai Surat Dirjen BKD Kemendagri Nomor 973/3875/Keuda Tanggal 18 September 2020

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor Nomor 973/3875/Keuda Tanggal 18 September 2020 hal Koordinasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dapat kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Surat Dirjen Bina Keuangan Daerah tersebut menyampaikan 2 (dua) berkas raperda yang berasal dari Kota Banjarbaru yang tidak diproses lebih lanjut dengan alasan sebagai berikut:

No.	Prov/Kab/Kota	Tentang	Keterangan
1.	Kota Banjarbaru	Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Pajak Daerah	Sudah diberikan rekomendasi melalui Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-319/PK/2019 Tanggal 4 Agustus 2020
2.	Kota Banjarbaru	Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Retribusi Penyedotan Kaku dan Retribusi Pengolahan Limbah Cair Domestik	Sudah diberikan rekomendasi melalui Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-319/PK/2019 Tanggal 4 Agustus 2020

2. Bersama ini kami lampirkan kembali surat dan lampiran matriks evaluasi raperda dimaksud.
3. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Bhimantara Widyajala



Tembusan:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

**Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan**

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kota Banjarbaru	Pajak Daerah	-	√	Sudah diberikan rekomendasi melalui Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-319/PK/2020 Tanggal 4 Agustus 2020
2	Kota Banjarbaru	Retribusi Penyedotan Kakus dan Retribusi Pengolahan Limbah Cair Domestik	-	√	Sudah diberikan rekomendasi melalui Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-319/PK/2020 Tanggal 4 Agustus 2020

